

Profesionalisme Polisi di Jepang

Oleh: Harry Hiroto Yamazaki

(Penasihat Kapolri, Chief Superintendent, Kepolisian Jepang, Tenaga Ahli JICA)

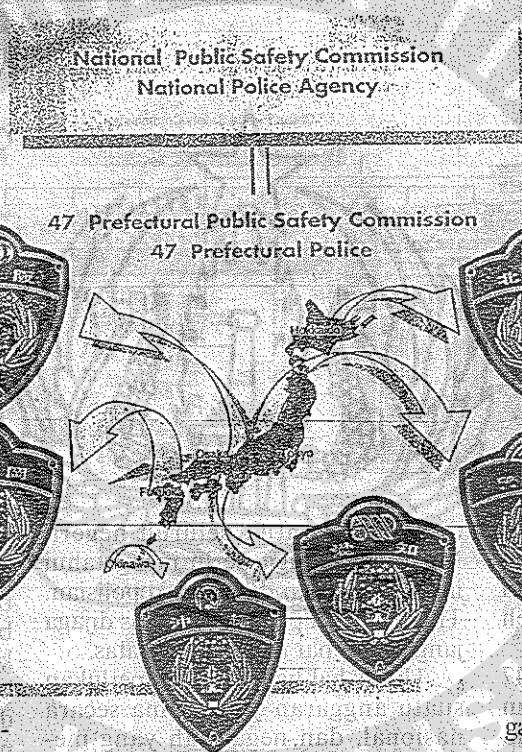
Sejak dua tahun lalu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah berpisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)/TNI menuju kepolisian sipil. Berdasarkan permintaan dari Pemerintah Indonesia, kali ini Pemerintah Jepang memutuskan untuk mendukung reformasi demokratis Kepolisian Indonesia untuk menjadi suatu badan kepolisian yang dicintai rakyatnya.

Juni 2000, saya bersama tim peninjau mengunjungi Indonesia untuk menjadikan Kepolisian Indonesia sebagai kepolisian sipil. Maka Pemerintah Jepang mengirim saya untuk membantu Polri sebagai Penasihat Kapolri. Awalnya pada Februari 1988 saya bertugas selama tiga tahun sebagai Sekretaris Utama (*1st Secretary*) di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Sejak itu, saya secara pribadi mulai tertarik dengan Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang besar.

Kerja sama bilateral antara Pemerintah Jepang dengan Indonesia sudah berjalan lama. Begitu juga penempatan atase kepolisian kedua negara. Sudah hampir 40 tahun Kepolisian Jepang telah mengirimkan atase kepolisiannya di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Saya merupakan atase ke-10. Atase di kedutaan kali ini adalah yang ke-14, dan semuanya adalah orang-orang yang mendukung Indonesia. Dalam bertugas kali ini pun, semua mantan atase kepolisian mendorong saya mengirim dan mengisi jabatan tersebut. Saya sendiri merasa mendapat suatu kehormatan besar untuk datang membantu reformasi di tubuh Polri.

Bagaimanakah perubahan kultur

polisi yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, sesuai dengan keinginan masyarakat? Itu semua tergantung bangsa Indonesia



sendiri. Sebagai bangsa Asia, Indonesia dan Jepang memiliki kultur (kebudayaan) yang hampir sama. Di Jepang masyarakatnya juga mengenal kata-kata 'musyawarah' dan 'gotong-ro-yong'. Saya ingin menerangkan tentang Organisasi Kepolisian Jepang mengenai keadaan dan sebagainya agar bisa dijadikan referensi dalam menggambarkan sosok kepolisian di masa datang.

ORGANISASI KEPOLISIAN JEPANG

Organisasi Kepolisian Jepang lahir pada zaman Meiji (kira-kira akhir abad 19), pada saat Jepang 'belajar' dari bangsa Eropa untuk menjadi negara

yang modern. Dengan mencontoh bentuk organisasi Kepolisian Perancis, Inggris dan Jerman, kami secara khusus meminta seseorang dari negara-negara tersebut sebagai penasihat. Sampai dengan Perang Dunia II, Kepolisian Jepang yang disebut sebagai Polisi Negara berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Karena kalah perang, pada saat masuknya Pemerintahan Tentara Sekutu, mereka merombak organisasi Kepolisian

Jepang dan Kementerian Dalam Negeri, karena pada saat itu Kepolisian Jepang dianggap sebagai alat negara yang menjadi faktor penyebab terjadinya perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Sistem Kepolisian Amerika pada saat itu juga memperkenalkan diri untuk dijadikan contoh. Pada akhirnya, dibentuklah sekitar 3.600 polisi daerah yang mandiri di seluruh Jepang.

Percobaan ini berakhir dengan kegagalan besar seiring dengan berlalunya waktu. Pada saat itu, kepolisian desa kecil hingga kota besar menamakan dirinya sebagai 'Superintendent Jenderal', sehingga membuat kekacauan di masyarakat. Belajar dari kegagalan dan introspeksi diri sebelum perang, akhirnya pada 1954 dibentuklah susunan Kepolisian Jepang yang terus berlaku sampai sekarang. Sebagai bahannya, dapat dilihat pada gambar 1-4 yang menerangkan tentang struktur Kepolisian Jepang dan struktur Kepolisian Kota Besar dan Daerah Chiba.

SUMBER PROFESIONALISME DAN CIRI KHAS KEPOLISIAN JEPANG

Tentara sekutu bukan hanya mengajarkan tentang otonomi organisasi

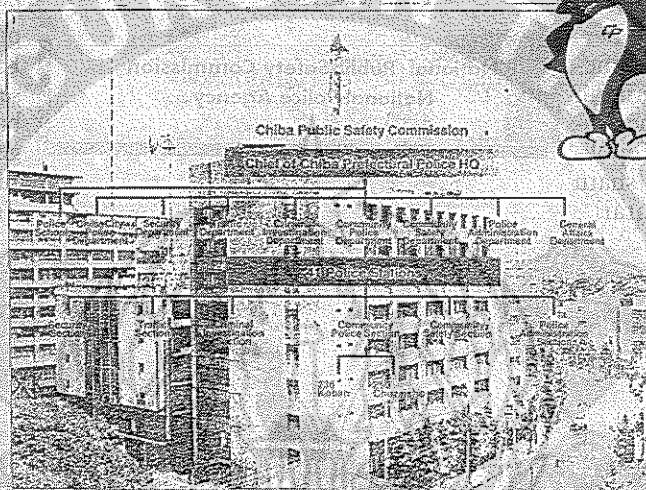
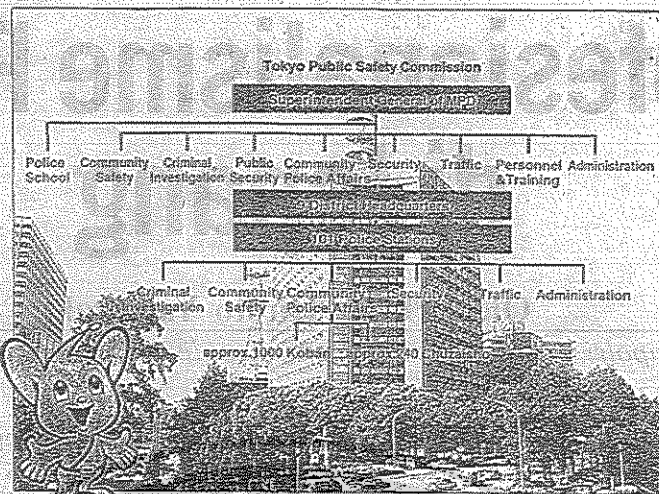
kepolisian, tetapi juga tentang suatu Komite Keamanan Khusus. Ketua panitia Komite Keamanan Umum Negara tersebut adalah menteri negara yang diangkat oleh Perdana Menteri dalam posisi politik. Selain itu ada empat anggota lain dari kalangan ilmuwan, pers, ekonomi, dan sebagainya yang posisinya tetap.

Komite Keamanan Umum Negara, baik ketua maupun anggotanya, tidak boleh mengawasi perkara pribadi. Perdana Menteri dan politikus pada saat bermaksud 'memakai' polisi untuk kepentingan pribadi atau memberikan tekanan kepada polisi melalui Komisi Keamanan Umum Negara juga merupakan hal yang tidak dibenarkan. Komite Keamanan Umum Negara, Kepala Kantor Kepolisian dan Kepolisian Pusat yang berwenang menangani urusan kepolisian. Sedangkan Perdana Menteri dan pihak luar tidak bisa campur tangan.

Salah satu dasar ke-profesionalisme-an Kepolisian Jepang adalah sikap netral terhadap politik. Hal ini didukung Komite Keamanan Umum. Untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, siapa pun pejabat tinggi, di lingkungan ekonomi, sosial atau politik, tidak bisa melepaskan diri dari kegiatan seperti pemeriksaan oleh polisi.

Kepolisian Jepang terdiri dari 47 kepolisian daerah yang melaksanakan tugas kepolisian secara independen. Kedudukan kepala kepolisian daerah setingkat dengan gubernur. Masing-masing calon dari kepolisian daerah tersebut direkrut untuk menjadi polisi. Sedangkan anggaran keuangan untuk kegiatan kepolisian dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Tetapi jika seluruh Keamanan Umum Jepang di tiap-tiap kepolisian daerah terdapat perbedaan besar yang bisa menimbulkan kekhawatiran masyarakat maka Badan Kepolisian Negara Jepang harus dapat memimpin, mengatur, dan menyelesaikan hal-hal di kepolisian seluruh negeri. Misalnya, hal-hal seperti pakaran seragam, senjata dan sebagainya pun



disamakan untuk seluruh negeri. Masyarakat juga perlu mengetahui ihwal persoalan di tubuh kepolisian. Tingkah laku polisi pun harus dijaga jangan sampai melampaui batas.

Untuk hal-hal tersebut diperlukan suatu anggaran yang sama secara nasional, dan negaralah yang menganggarkannya. Kemudian ketika ada kejahatan yang meluas di seluruh daerah, Badan Kepolisian Negara Jepang mengatur dan memimpin pengusutan. Bila ada kasus khusus seperti di atas, kebutuhan biaya pengusutannya dianggarkan negara kepada daerah.

Kepolisian Jepang juga memerlukan pengaturan suatu pertukaran polisi daerah ke Badan Kepolisian Negara Jepang, untuk menambah pengalaman mengenai pola kerja kepolisian negara dan bagaimana arah serta tujuan mereka. Pertukaran seperti ini pada saat yang sama amatlah berguna bagi tingkat pengetahuan dan

pengalaman polisi kota dan daerah. Juga bisa dijadikan ukuran tentang kemampuan dari masing-masing daerah.

Dengan cara tersebut, ke-profesionalisme-an meluas di seluruh negeri dan tingkat kemampuan tetap terpelihara sampai dengan tingkat tertentu dan hal-hal penting pun bisa ditangani bersama. Selain itu, bila membicarakan mengenai profesionalisme, polisi Jepang pun harus merujuk pada perkembangan sosial dan ekonomi, letak geografis, sejarah, kebudayaan, tradisi dan sebagainya.

Sebenarnya masih banyak hal yang bisa saya gambarkan mengenai institusi kepolisian di Jepang. Tapi karena terbatasnya waktu dan kesempatan saat ini, maka saya membatasi diri hanya pada dua hal di atas.

BAGAIMANA DI INDONESIA

Keadaan negara Indonesia pada saat ini menarik perhatian banyak orang, khususnya masalah tugas dan cara kerja kepolisian, karena kedamaian dan ketentraman bangsa Indonesia sangatlah penting bagi dunia. Saya secara pribadi, pada kesempatan ini ingin mengatakan bahwa 'kepolisian yang netral terhadap politik' memiliki arti yang amat penting.

Kenetralan, atau dengan kata lain keteguhan kepolisian serta kepercayaan dari masyarakat amatlah penting. Saya pun ingin membantu walaupun dengan kemampuan yang terbatas untuk menjadikan Kepolisian Indonesia menjadi kepolisian yang netral dan dicintai masyarakatnya.

■ Disampaikan pada Seminar mengenai "Transformasi Kultural dalam tubuh Polri menuju Profesionalisme", 14 Juni 2001.